

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan kriteria Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan maka dapat disimpulkan bahwa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cihaurgeulis berjalan belum maksimal 100% karena masih terdapat berbagai kendala dalam setiap indikatornya. Dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan serta sumber daya manusia seperti pengurus dan masyarakat masih ada hambatan. Secara khusus simpulan dari sebagai berikut:

1. Efektivitas : Efektivitas suatu program dapat diperhatikan ketika program dapat mencapai tujuan. Pencapaian tujuan PIPPK serta harapan dari berbagai pihak terpenuhi. Pengurus di Kelurahan Cihaurgeulis menyesuaikan tujuan PIPPK dengan harapan akan program ini sudah tercapai, terutama dari segi pembangunan dan perbaikan infrastruktur dibandingkan dengan segi pemberdayaan yang masih kurang. Dalam realisasi PIPPK di Kelurahan Cihaurgeulis ditemukan penurunan setiap tahun sebab adanya pemotongan dana karena Pandemi. Kelurahan Cihaurgeulis mempunyai masyarakat yang variatif, selain itu respon masyarakat yang masih pasif terhadap pelaksanaan program, sehingga di Cihaurgeulis belum sepenuhnya mendukung keberhasilan efektivitas pelaksanaan program PIPPK.

2. Efisiensi : Sejauh ini jumlah dana PIPPK Rp 100 juta sudah mencukupi kebutuhan dengan efisien. Belanja sandang, ATK dan Operasional lainnya sudah tercover dari dana PIPPK berdasarkan kebutuhan. Didukung dengan sarana dan prasarana yang tersedia seperti perbaikan balai RW, perbaikan jalan kecil, *communal safety tank*, penyediaan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer*, penyemprotan disinfektas, sosialisasi sembako dan sebagainya. Sarana dan prasana LKK sudah terkelola dengan baik kecuali Karang Taruna yang tidak digunakan berdasarkan fungsinya. Dilihat dari kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki belum maksimal masih terdapat penyimpangan karena beban kerja yang cukup berat dan beberapa pengurus belum paham karena merupakan pengurus pindahan maka belum efisien. Diperlukan SDM ahli sebagai fasilitator tambahan agar lebih fokus terhadap PIPPK terutama di lapangan. Sumberdaya yang berkontribusi paling dominan adalah SDM, selain itu sumberdaya manusia terbilang belum kompeten dikarenakan banyak aparat kelurahan yang baru atau pindahan yang belum berpengalaman di kewilayahan.
3. Kecukupan : Dana yang berjumlah Rp 100 juta dapat dikatakan sudah cukup namun Pandemi menjadi penghambat serta jumlah RT di setiap RW yang tidak merata. Dengan SDM yang ada komunikasi yang terjalin antar PPTK dan LKK masih belum maksimal. Komunikasi yang terjalin antar PPTK dan LKK masih belum maksimal, mekanisme masih sebatas pelaporan secara berkala. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk SPJ.

4. Perataan : bahwa pendistribusian informasi terkait kegiatan PIPPK dilakukan secara langsung dengan pembinaan atau yang biasa disebut Rembug Warga serta menggunakan aplikasi *Instagram* sebagai sarana masyarakat dan Kelurahan dalam bertukar informasi dan komunikasi. Adapun untuk pendistribusian dana semuanya bersumber dari pemerintah kota Bandung untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dimana pendistribusian dana ini bersifat sistematis. Kesimpulannya informasi tentang PIPPK ini sudah merata ke lingkup masyarakat dan pendistribusian dana sudah merata karena pengajuannya sistematis. Pengajuan dilakukan setiap setahun sekali, jadi tidak bisa mendadak.
5. Responsivitas : Kesimpulannya bahwa kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur di Kelurahan Cihaurgeulis sudah terpenuhi. Namun disisi lain masyarakat menilai bahwa kegiatan non fisik yaitu sosialisasi dan pelatihan belum sepenuhnya merata dan beberapa masyarakat lainnya belum memahami mekanisme terkait program PIPPK. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cihaurgeulis belum maksimal dan pendekatan yang dilakukan masih kepada warga yang dekat dengan para pemangku kepentingan saja, dilihat hanya beberapa warga dari beberapa RW yang ikut serta pada saat pelaksanaan program dilapangan.
6. Ketepatan : Bahwa hampir seluruh masyarakat mengetahui program PIPPK, namun dalam lingkup pemberdayaan belum merata dan perencanaannya belum maksimal. Jika fokus program hanya kepada pelaksanaan infrastuktur, dapat disimpulkan program ini belum tepat sasaran pada aspek pemberdayaan

masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur, masyarakat merasa terpenuhi kebutuhannya. Namun untuk aspek pemberdayaan program ini di Kelurahan Cihaurgeulis belum tepat sasaran.

6.2 Saran

Terkait analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan penulis memberi berbagai saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pengurus Pemerintah Kota Bandung dan pengurus PIPPK di Kelurahan Cihaurgeulis. Peneliti memberi 6 saran untuk meningkatkan kegiatan PIPPK di Kelurahan Cihaurgeulis , sebagai berikut:

- A. Efektivitas : Walaupun efektivitas sudah tercapai ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti lebih diperhatikan juga pada segi pemberdayaan agar seimbang. Pemberdayaan juga penting tidak hanya berupa sembako, tetapi seperti bantuan insentif guru, pelatihan kader kesehatan masyarakat, sosialisasi pemberdayaan wanita dan anak, serta penyelenggaraan festival kebudayaan. Kemudian LKK di Kelurahan harus berinovasi dalam apa yang mau diajukan serta bekerja sama juga dengan PPTK. Kolaborasi kegiatan pelatihan dan sosialisasi PIPPK agar meratanya realisasi kegiatan yang dilaksanakan. Melakukan tindakan serius dari Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan dengan memotivasi mengenai pentingnya pembangunan kewilayahan. Dalam konteks diharapkan masyarakat Cihaurgeulis untuk lebih kreatif dan antusias dalam proses pembangunan dan pemberdayaan karna

untuk menciptakan keberhasilan pembangunan dibutuhkan peran serta atau partisipasi masyarakat.

- B. Efisiensi : Dalam meningkatkan efisiensi PIPPK perlu penambahan Tenaga Ahli Teknis Pendampingan PIPPK dan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Kewilayahan dan Lembaga Kemasyarakatan tentang Petunjuk Teknis PIPPK agar tidak terjadi salah paham ataupun salah komunikasi dalam pelaksanaan PIPPK.
- C. Kecukupan : Sejauh ini dana yang disediakan Pemkot serta sarana dan prasarana yang disediakan sudah cukup. Namun menurut peneliti untuk sarana dan prasarananya masih ada lahan yang tidak terpakai. Seperti lapangan Bally hanya lapangan kosong penuh dengan tanaman liar. Saran kedepannya lebih baik dimanfaatkan lebih baik seperti dibangun lapangan badminton untuk masyarakat beraktivitas. Segi SDM perlu dilakukan sosialisasi ataupun pelatihan bagi calon pengurus PIPPK.
- D. Perataan : Secara umum sudah merata tetapi penulis menemukan masih banyak masyarakat yang belum paham tentang PIPPK. Masyarakat hanya tahu kalau ada pembangunan itu hanya program dari pemerintah tanpa tahu PIPPK itu apa. Baiknya untuk kedepan informasi mengenai PIPPK disebarakan melalui grup *Whatsapp* yang berisi tiap kepala keluarga. Masing-masing grup tiap RW agar lebih luas penyebarannya. Saran juga bisa dengan manual yaitu pembagian surat *door to door*.
- E. Responsivitas : Walaupun banyak respon positif dari masyarakat terkait program ini, tetapi peneliti menyarankan jika ada pembangunan dan

pemberdayaan diharapkan pengurus PIPPK dari Kelurahan dan LKK mau mengajak masyarakat terjun untuk melihat pembangunan infrastruktur dan mengikuti pemberdayaan yang ada. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya perangkat Lembaga RW bahwa dalam mengusulkan program dan kegiatan yang tidak hanya terfokus pada pembangunan sektor fisik yaitu pembangunan infrastruktur saja tetapi juga dalam pembangunan sektor non fisik seperti sektor pendidikan, sanitasi, kesehatan, dan sektor pertanian/perkebunan juga penting peranannya untuk mendukung pembangunan daerah.

- F. Ketepatan : Demi meningkatkan pemberdayaan di Kelurahan Cihaurgeulis kedepannya lebih fokus pada pemberdayaan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Keagamaan seperti mengadakan lomba ngaji.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William. (1994). *Public Policy Analysis, an Introduction*. New Jersey : Prentice Hall.
- Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis : An Integrated Approach (6th Edition)*. New York: Routledge, Taylor & Francis
- Mardikanto, Totok. (1994). *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian*. Surakarta : UNS Press.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja.
- Rutman, Leonard. (1984). *Evaluation Research Methods: A Basic Guide* London: Sage Publications.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widoyoko. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasan, Said Hamid. (2008). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Yuwono, Teguh. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak)*. Semarang: UNDIP Semarang.

Sumber Artikel Jurnal :

- Amirin, Tatang. (2005). Membedah Konsep dan Teori Partisipasi Serta Implikasi Operasionalnya Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pendidikan*. (No.1 : 80)
- Idil, A. (2018). Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Lokal. *Jurnal Reformasi Administrasi*. (Vol 5, No.2 : 105).
- Ramdani, Deni & Habibi, Fikri. (2017). Penguatan partisipasi dilakukan dalam mendorong program smart city kota bandung supaya masyarakat menjadi subjek utama dalam pembangunan. *Jurnal Media Informatika*. (Vol 1, No.2 : 125)

Sumber Internet :

- Artikel Pendidikan. (2021). Teori Administrasi Publik Menurut Para Ahli, Diakses dari <https://artikelpendidikan.id/teori-administrasi-publik/> pada 17 November 2021 , Pukul 23.57 WIB
- Bahri, Hizbul. (2019). Pengertian Evaluasi Program Menurut Para Ahli, Diakses dari <https://www.slideshare.net/HiszbulBahri/pengertian-evaluasi-program-menurut-para-ahli-170665616> Pada 20 November 2021, Pukul 14.23 WIB
- Dewi, Shita. (2019). Sifat Kebijakan dan Perilaku Pengambilan Kebijakan, Diakses dari <https://www.kebijakankesehatanindonesia.net/23-agenda/2508-sifat-kebijakan-dan-perilaku-pengambilan-kebijakan> 19 November 2021, pukul 20.30
- Dosen Pendidikan. (2021). Pengertian Kebijakan Publik, Diakses dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-kebijakan-publik/> 19 November 2021, Pukul 12.35 WIB
- Dosen Pendidikan. (2021). Pengertian Pembangunan Menurut Para Ahli, Diakses dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/> Pada tanggal 20 November 2021, Pukul 14.38 WIB
- Dunn, William. (1999). Analisa Kebijaksanaan Publik, Hal 169 <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/> Pada tanggal 20 November 2021, Pukul 14.38 WIB

- Dwi, Syamsul. (2021). Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli, Diakses dari <https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu> Pada 21 November 2021, Pukul 14.43 WIB
- Heryani, A. Paradigma kebijakan Publik. (2010). dikutip dari Rossi, Freeman (1997) <https://www.slideshare.net/HiszbulBahri/pengertian-evaluasi-program-menurut-para-ahli-170665616> 20 November 2021, Pukul 14.23 WIB
- Ibeng, Parta. (2021). Pengertian Evaluasi, Diakses dari <https://pendidikan.co.id/pengertian-evaluasi/> 20 November 2021, Pukul 13.26
- Kanal Pengetahuan. (2017). Pengertian Publik, Diakses dari <https://www.kanal.web.id/pengertian-publik> pada 17 November 2021, Pukul 23.30 WIB
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Pengertian Kebijakan, Diakses dari https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html Pada 17 November 2021, Pukul 23.45 WIB
- Kumpulan Pengertian. (2015). Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html> pada 18 November 2021, Pukul 11.47 WIB
- Populix. (2021). Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan Data Sekunder, diakses dari <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah> , Pada 4 Nov 2021, Pukul 10.22
- Rabbani, Aletheia. (2017). Pengertian Pemberdayaan Menurut Para Ahli, Diakses dari <https://www.sosiologi79.com/2017/07/pengertian-pemberdayaan-menurut-ahli.html> Pada 21 November 2021, Pukul 14.46 WIB
- Siadari, Coki. (2015). Pengertian Pembangunan Menurut Para Ahli , Diakses dari <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli.html> Pada tanggal 20 November 2021, Pukul 14.40 WIB

Seputar Pengetahuan. (2017). Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli.html> pada 18 November 2021, pukul 12.29 WIB

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, diakses dari <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>, Pada 3 November 2021, Pukul 22.28 WIB

Sumber Kebijakan :

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018

Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan Kota Bandung

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan